

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional terorganisasi yang hingga kini masih mengancam dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah dengan potensi ancaman perdagangan manusia yang cukup tinggi. Asia Tenggara menjadi pasar perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, negara transit hingga negara tujuan para korban maupun pelaku perdagangan manusia. Sebagai organisasi regional di kawasan, ASEAN menaruh perhatian dan komitmen lebih terhadap ancaman tersebut. ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan perdagangan di kawasan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membentuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) pada tahun 2015. Konvensi tersebut ditandatangani dan diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN termasuk Kamboja. Konvensi tersebut bertujuan agar negara-negara anggota dapat mencegah, mendakwa dan menghukum pelaku serta melindungi korban perdagangan manusia. Selain daripada itu, ACTIP juga menekankan pentingnya kerja sama regional dan internasional untuk mengefektifkan pemberantasan perdagangan manusia.

Dari tahun 2020-2022, Kamboja mengalami kenaikan dan penurunan angka perdagangan manusia. Dengan angka perdagangan manusia yang cukup tinggi pada tahun 2021 yaitu 359 kasus, Kamboja memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan ACTIP di negaranya. Untuk melihat bagaimana implementasi dan keefektifan ACTIP di Kamboja, penulis menggunakan teori efektivitas rezim internasional milik Arild Underdal. Melalui teori tersebut, keefektifan suatu rezim dilihat melalui tiga variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel intervensi. Setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa permasalahan perdagangan manusia di Kamboja dinilai bersifat *benign* atau tidak rumit diukur dari sub-variabel *problem malignancy*. Akan tetapi, sub-variabel *problem solving capacity* tidak dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Kamboja. Sehingga, variabel independen bersifat negatif terhadap rezim. Di sisi lain, variabel dependen bersifat positif karena adanya hubungan antarkomponen yang positif serta variabel intervensi menunjukkan bahwa rezim ACTIP berada pada skala 2. Disimpulkan bahwa rezim ACTIP yang diimplementasikan di Kamboja tidak cukup efektif dan berada pada skala 2. Dapat disimpulkan bahwa asumsi dasar pada awal penelitian terbukti sesuai dengan hasil analisis.